

KATALOG : 7203005.18

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2015



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNGB  
BPS-STATISTICS OF LAMPUNG PROVINCE



## STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 2015

<b>ISSN</b>	: 0126 – 4699
<b>No. Publikasi</b>	: 18540.1610
<b>Katalog BPS</b>	: 7203005.18
<b>Ukuran Buku</b>	: 21 cm x 28 cm
<b>Jumlah Halaman</b>	: ix + 76 halaman

**Naskah:**

Bidang Statistik Distribusi  
BPS Provinsi Lampung

**Gambar Kulit:**

Bidang Statistik Distribusi  
BPS Provinsi Lampung

**Diterbitkan Oleh:**

BPS Provinsi Lampung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

## KATA PENGANTAR

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung 2015, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2014 dan tahun 2015 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

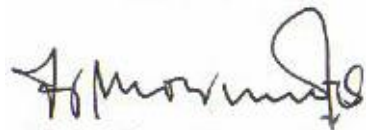
Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan daerah.

Kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang masih kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, November 2016

*BPS PROVINSI LAMPUNG*

K e p a l a,



Yeane Irmaningrum S.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I. PENJELASAN UMUM .....	1
1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data .....	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	4
BAB III. ULASAN RINGKAS .....	11
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung .....	11
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung.....	15
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung .....	16
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	19
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	20
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung .....	21
3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2014 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2015 (Juta Rupiah) .....	14
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2015 (Juta Rupiah).....	15
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2014-2015 .....	18
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2014-2015 (Ribu Rupiah) .....	20
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2014-2015 .....	22
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2014-2015 .....	25
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2014-2015.....	26
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2014-2015 .....	27
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2014-2015.....	28
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2014-2015 .....	29
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2014-2015.....	30
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2014-2015 .....	31
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2015 .....	32
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2014-2015 .....	33
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2014-2015.....	34
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2014-2015 .....	35
Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2014-2015.....	36
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2014-2015.....	37
Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2014-2015.....	38

Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014-2015	39
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2014-2015 .....	40
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2014-2015 .....	41
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2014-2015 .....	42
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2014-2015.....	43
Tabel 20.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2014-2015.....	44
Tabel 21.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2014-2015 .....	45
Tabel 22.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2014-2015.....	46
Tabel 23.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2014-2015.....	47
Tabel 24.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2015.....	48
Tabel 25.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2014-2015.....	49
Tabel 26.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2014-2015.....	50
Tabel 27.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2014-2015 .....	51
Tabel 28.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2014-2015.....	52
Tabel 29.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2014-2015 .....	53
Tabel 30.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2014-2015.....	54
Tabel 31.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014-2015.....	55
Tabel 32.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2014-2015.....	56
Tabel 33.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2014-2015.....	57
Tabel 34.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2014-2015.....	58
Tabel 35.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2014-2015.....	59
Tabel 36.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2014-2015.....	60
Tabel 37.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2014-2015 .....	61
Tabel 38.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2014-2015 .....	62

Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2014-2015 .....	63
Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2014-2015 .....	64
Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2014-2015 .....	65
Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2014-2015.....	66
Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2014-2015 .....	67
Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2014-2015 .....	68
Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2014-2015.....	69
Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2014-2015 .....	70
Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014- 2015.....	71
Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2014-2015 .....	72
Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2014-2015 .....	73
Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2014-2015 .....	74
Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2014-2015 .....	75



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, 2015 .....	16
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung, 2015 .....	17
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2015 .....	21

<http://lampung.bps.go.id>

## **BAB I. PENJELASAN UMUM**

### **1.1. Pendahuluan**

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah seperti Infrastruktur Penghubung Jawa Sumatera (IPJS), Jalan Tol Terbanggi-Bakauheni, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

## **1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data**

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2.

### **1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi**

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.

### 1.2.3. Jenis daftar isian yang digunakan

#### Daftar K-1

Daftar ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

#### Daftar K-2

Daftar K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<http://lampung.bps.go.id>

## BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bagi Hasil Pajak:  
Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- Bagi Hasil Bukan Pajak :

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- DAU

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- DAK

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- Lain-lain pendapatan yang sah, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota



DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

### **BAB III. ULASAN RINGKAS**

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Sejak tahun 2002, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

#### **3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung**

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung tahun 2015, pemerintah daerah telah mencapai kemajuan walaupun masih banyak kendala dan

tantangan yang dihadapi. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan situasi perekonomian yang cenderung belum stabil. Hal tersebut terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen *year on year* (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 5,08 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang tumbuh 4,79 persen (yoy). Sektor yang dominan masih dikuasai tiga sektor yaitu pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel, dan restoran. (BPS Provinsi Lampung, 2016).

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Sesuai dengan arah kebijakan PAD pemerintah Provinsi Lampung, menetapkan hal sebagai berikut :

- Dalam menetapkan PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan ekonomi tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan terkait peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

- Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

(Pemerintah Provinsi Lampung, 2015).

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 4,72 trilyun rupiah, lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2014 yaitu 4,57 trilyun rupiah atau naik 3,42 persen. Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2015 dianggarkan mencapai 1,58 trilyun rupiah mengalami kenaikan 7,26 persen dari tahun 2014 yaitu sebesar 1,47 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 2,64 trilyun rupiah mengalami kenaikan 17,62 persen dari tahun 2014 yaitu sebesar 2,25 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2015 dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 2,08 trilyun rupiah turun 5,20 persen dari tahun 2014 yaitu sebesar 2,20 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2014 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2015 (Juta Rupiah)**

Rincian	Realisasi 2014	Anggaran 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>4 567 673,50</b>	<b>4 723 690,70</b>	<b>3,42</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>4 526 532,29</b>	<b>4 697 690,70</b>	<b>3,78</b>
Pendapatan Asli Daerah	2 274 685,57	2 341 611,59	2,94
Dana Perimbangan	1 472 486,57	1 579 395,05	7,26
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	779 360,15	776 684,06	- 0,34
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>41 141,21</b>	<b>26 000,00</b>	<b>- 36,80</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>4 454 187,32</b>	<b>4 723 190,70</b>	<b>6,04</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2 253 775,71</b>	<b>2 637 268,60</b>	<b>17,02</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 200 411,61</b>	<b>2 085 922,10</b>	<b>- 5,20</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1 930,00</b>	<b>500,00</b>	<b>- 74,09</b>

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2015. Dari rencana penerimaan sebesar 4,72 trilyun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 4,89 trilyun rupiah atau mengalami kenaikan 3,71 persen. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa komponen pendukung pendapatan daerah yang naik seperti lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 32,06 persen. Sedangkan PAD dan dana perimbangan tidak mengalami penurunan yang tinggi. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan tahun 2015. Hal tersebut terlihat pada perubahan komponen pendukungnya seperti belanja langsung yang mengalami peningkatan. Realisasi belanja langsung naik 5,31 persen menjadi 2,19 trilyun rupiah dari 2,08 trilyun rupiah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi belanja langsung juga mengalami penurunan sebesar 2,80 persen dari rencana anggaran 2,37 trilyun rupiah menjadi 2,31 trilyun rupiah.

**Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung  
2015 (Juta Rupiah)**

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>4 723 690,70</b>	<b>4 898 783,19</b>	<b>3,71</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>4 697 690,70</b>	<b>4 787 308,49</b>	<b>1,91</b>
Pendapatan Asli Daerah	2 341 611,59	2 247 342,67	(4,03)
Dana Perimbangan	1 579 395,05	1 514 291,53	(4,12)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	776 684,06	1 025 674,29	32,06
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>26 000,00</b>	<b>111 474,70</b>	<b>328,75</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>4 723 190,70</b>	<b>4 781 202,05</b>	<b>1,23</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2 637 268,60</b>	<b>2 584 515,35</b>	<b>(2,00)</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 085 922,10</b>	<b>2 196 686,70</b>	<b>5,31</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500,00</b>	<b>15 069,55</b>	<b>2 913,91</b>

### 3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

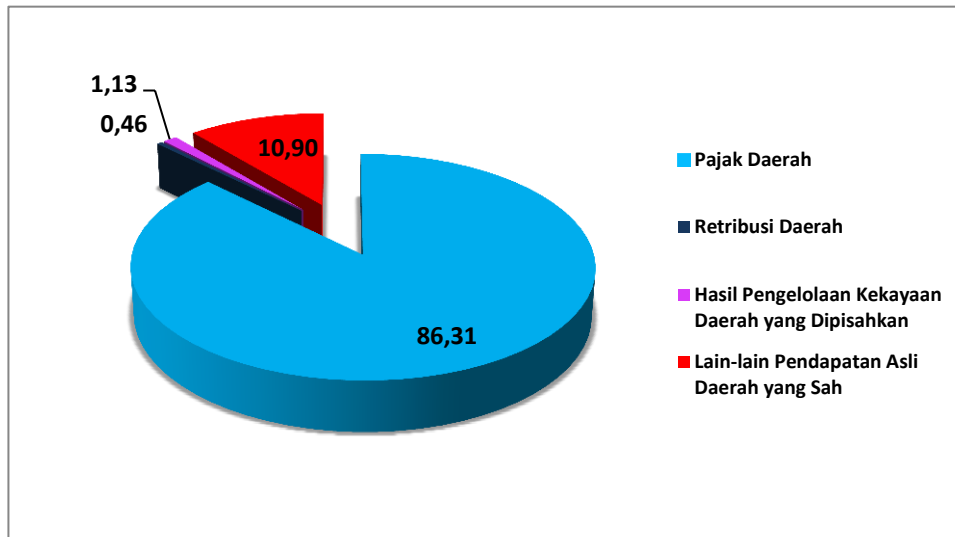
Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2015 lebih besar 1,22 persen dari 2,27 triliun rupiah tahun 2014 menjadi 2,34 triliun rupiah. Tahun 2015, persentase sumber pendapatan dari PAD lebih tinggi dibandingkan dengan dana perimbangan yaitu 46,94 persen. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap



total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2015 sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan masih lebih besar dibandingkan tahun 2014 dengan nilai rasio sebesar 46,94 persen yang menunjukkan tingkat kemandirian Provinsi Lampung semakin baik. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

**Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2015**



Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2015 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 86,31 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,46 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

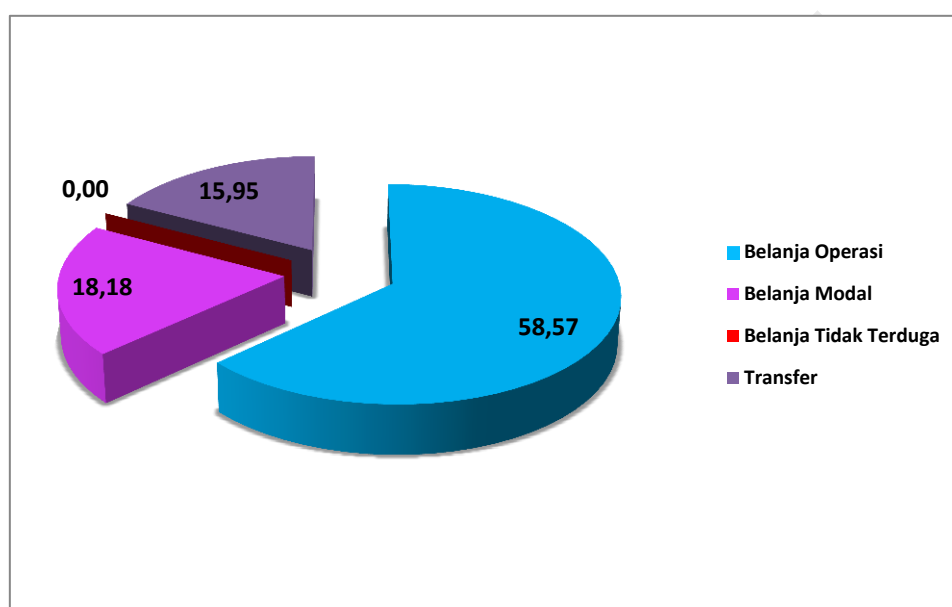
### 3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2015, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 58,57 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 28,81 persen; 28,51 persen; dan 41,76 persen. (Gambar 3.2 dan Diolah dari Tabel 2 lampiran).

**Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2015**



Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 58,57 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Gambar 3.2).

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal terhadap total belanja yaitu sebesar 18,18 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase

jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Gambar 3.2).

Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2014 belanja tidak langsung tahun 2015 mengalami kenaikan. Jika tahun 2014 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 48,15 persen, maka tahun 2015 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 54,06 persen. Dengan naiknya *share* belanja tidak langsung tahun 2015, hal ini berarti pemerintah cenderung kurang mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi. (Tabel 3.3)

**Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2014-2015**

Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>48,15</b>	<b>54,06</b>
Belanja Pegawai	12,22	14,66
Belanja Hibah	19,03	22,85
Belanja Bantuan Sosial	0,10	0,13
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16,23	15,95
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	<b>0,45</b>	<b>0,47</b>
Belanja Tidak Terduga	0,12	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>51,85</b>	<b>45,94</b>
Belanja Pegawai	2,45	1,89
Belanja Barang dan Jasa	28,62	25,88
Belanja Modal	20,78	18,18

### 3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah otonomi baru/pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2015, penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2014, penerimaan daerah tahun 2015 naik 13,27 persen dari 4,32 trilyun rupiah menjadi 4,89 trilyun rupiah. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 24,85 persen dari 0,82 trilyun rupiah menjadi 1,02 trilyun rupiah di tahun 2015. Sedangkan kenaikan terendah diperoleh dari dana perimbangan yang naik 2,88 persen dari 1,47 trilyun rupiah menjadi 1,51 trilyun rupiah di tahun 2015. (Tabel 3.4).

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2015 mengalami peningkatan 10,56 persen atau mencapai 4,78 trilyun rupiah dari sekitar 4,32 trilyun rupiah tahun 2014. Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 22,99 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2015 turun 0,91 persen. (Tabel 3.4).

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2015 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 77,59 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 85,68 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 85,17 persen, dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 82,58 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Pesisir Barat sebesar 59,66 persen. (Diolah dari Tabel 35 lampiran).

**Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2014-2015 (Ribuan Rupiah)**

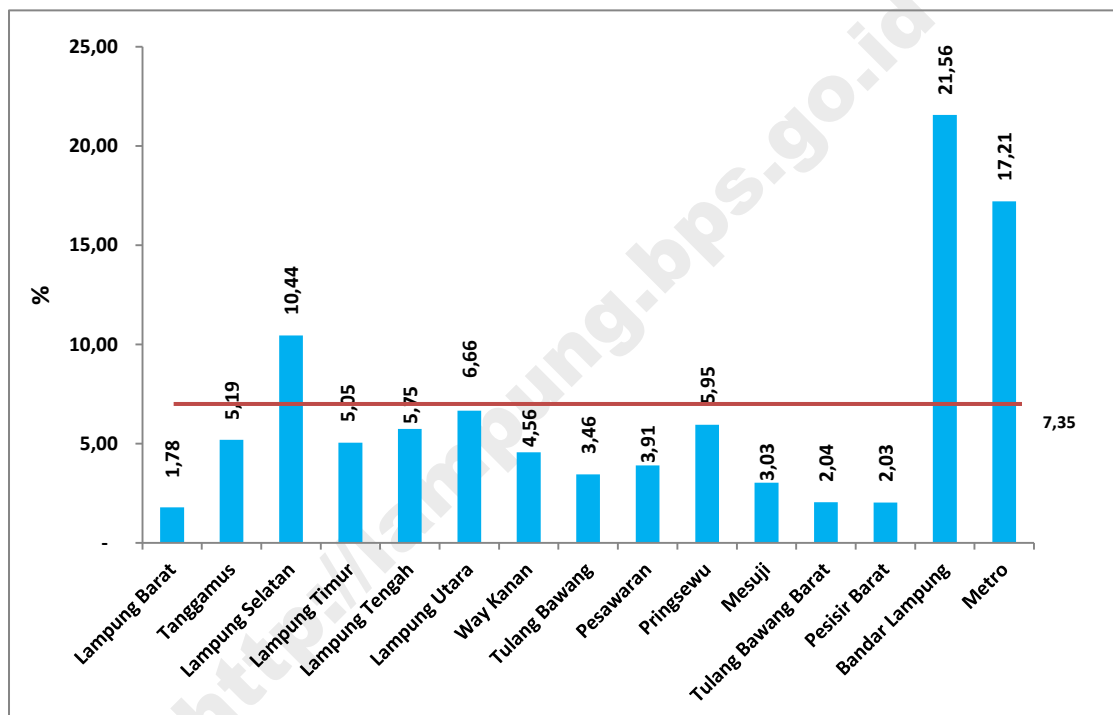
Rincian	2014	2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>16 353 358 445,44</b>	<b>18 500 550 842,90</b>	<b>13,13</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>15 077 794 005,17</b>	<b>17 374 445 306,07</b>	<b>15,23</b>
Pendapatan Asli Daerah	1 174 862 546,34	1 276 832 335,17	8,68
Dana Perimbangan	11 243 462 592,67	12 165 893 796,58	8,20
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 659 468 866,17	3 931 719 174,32	47,84
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1 275 564 440,27</b>	<b>1 126 105 536,83</b>	<b>(11,72)</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>14 720 871 216,51</b>	<b>17 414 130 037,10</b>	<b>18,30</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8 093 046 239,68</b>	<b>9 334 799 715,00</b>	<b>15,34</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>6 446 945 088,83</b>	<b>7 700 893 681,35</b>	<b>19,45</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>180 879 888,00</b>	<b>378 436 640,76</b>	<b>109,22</b>

### 3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD yang naik hingga 8,68 persen dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 1,17 triliun rupiah menjadi 1,27 triliun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 7,35 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Tabel 3.4 dan diolah dari Tabel 19 lampiran).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu 21,56 persen sementara Kabupaten Lampung Barat rasio kemandirian paling rendah yaitu 1,78. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. (Gambar 3.3).

**Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2015**



### 3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2015 meningkatkan kontribusi belanja langsung dari 44,34 persen tahun 2014 menjadi 45,20 persen. Sementara itu, untuk belanja tidak langsung pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 55,66 persen tahun 2014 menjadi 54,80 persen tahun 2015. Dari Tabel 3.5, pemerintah kabupaten/kota mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja menjadi 46,58 persen dari 51,15 persen tahun 2015. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota mulai mengurangi alokasi dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur

negara. Sehingga tujuan adanya pemekaran wilayah untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai. (Tabel 3.5).

**Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2014-2015**

Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>55,66</b>	<b>54,80</b>
Belanja Pegawai	51,15	46,58
Belanja Bunga	0,04	0,03
Belanja Subsidi	0,01	0,01
Belanja Hibah	1,34	2,12
Belanja Bantuan Sosial	0,38	0,30
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,01	0,01
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,65	5,72
Belanja Tidak Terduga	0,09	0,03
<b>Belanja Langsung</b>	<b>44,34</b>	<b>45,20</b>
Belanja Pegawai	4,95	4,73
Belanja Barang dan Jasa	18,33	18,15
Belanja Modal	21,06	22,33

### 3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya kebelanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani

(2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Selama tahun 2014 – 2015, pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 71,01 miliar rupiah (30,74 persen dari PDRB) pada tahun 2014 menjadi 76,15 miliar rupiah (30,08 persen dari PDRB) pada tahun 2015 dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 31,15 persen. (BPS Provinsi Lampung, 2015).



## **TABEL – TABEL LAMPIRAN**

<http://lampung.bps.go.id>

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4 526 532 292,01</b>	<b>4 787 308 489,03</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2 274 685 572,91</b>	<b>2 247 342 667,61</b>
Pajak Daerah	1 946 452 924,02	1 963 322 716,95
Retribusi Daerah	9 253 336,15	10 376 053,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25 462 864,86	25 715 957,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	293 516 447,88	247 927 939,85
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 472 486 568,52</b>	<b>1 514 291 528,64</b>
Bagi Hasil Pajak	142 641 116,84	105 182 867,10
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	144 940 790,68	66 912 822,54
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 136 053 041,00	1 097 129 439,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	48 851 620,00	245 066 400,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>779 360 150,58</b>	<b>1 025 674 292,78</b>
Pendapatan Hibah	22 926 122,48	19 264 124,92
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	748 609 106,10	1 006 209 812,50
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7 824 922,00	200 355,36

**Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>4 454 187 317,37</b>	<b>4 781 202 048,88</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2 144 560 814,84</b>	<b>2 584 515 351,36</b>
Belanja Pegawai	544 114 849,55	700 857 891,66
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	847 424 324,45	1 092 450 978,75
Belanja Bantuan Sosial	4 521 800,00	6 409 900,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	723 095 812,55	762 543 531,45
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20 173 866,28	22 253 049,49
Belanja Tidak Terduga	5 230 162,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 309 626 502,54</b>	<b>2 196 686 697,52</b>
Belanja Pegawai	109 214 896,33	90 380 434,29
Belanja Barang dan Jasa	1 274 956 923,03	1 237 307 067,78
Belanja Modal	925 454 683,17	868 999 195,46

**Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>39 211 205,08</b>	<b>96 405 154,71</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>41 141 205,08</b>	<b>111 474 702,21</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41 141 205,08	111 474 702,21
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>15 069 547,50</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 930 000,00	15 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	69 547,50
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>111 556 179,71</b>	<b>102 511 594,86</b>

**Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>634 237 104,48</b>	<b>895 544 662,61</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>40 800 358,95</b>	<b>46 434 649,52</b>
Pajak Daerah	5 754 256,70	7 220 425,16
Retribusi Daerah	1 779 453,56	1 915 353,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 068 337,25	3 285 125,58
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30 198 311,44	34 013 745,49
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>499 309 896,53</b>	<b>639 899 114,77</b>
Bagi Hasil Pajak	28 484 759,53	24 712 992,77
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	388 754 357,00	491 134 702,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	82 070 780,00	124 051 420,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>94 126 849,01</b>	<b>209 210 898,33</b>
Pendapatan Hibah	3 000 000,00	70 159 094,72
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	34 858 642,01	35 484 878,60
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56 268 207,00	103 566 925,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

**Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>872 588 834,43</b>	<b>1 231 542 207,45</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>22 488 697,78</b>	<b>21 979 172,08</b>
Pajak Daerah	9 143 084,55	10 007 071,78
Retribusi Daerah	3 969 096,65	1 349 763,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 294 264,86	3 699 092,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 082 251,72	6 923 244,04
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>804 442 823,02</b>	<b>880 574 155,27</b>
Bagi Hasil Pajak	23 386 775,87	19 501 663,45
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 112 031,15	14 912 893,82
Dana Alokasi Umum ( DAU )	669 512 156,00	698 708 398,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	84 431 860,00	147 451 200,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>45 657 313,63</b>	<b>328 988 880,10</b>
Pendapatan Hibah	0,00	13 030 560,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	45 657 313,63	46 331 662,93
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151 336 264,67	269 626 657,18

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2014-2015****(000 Rp)**

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 348 589 997,90</b>	<b>1 547 761 894,24</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>130 597 526,74</b>	<b>161 645 901,76</b>
Pajak Daerah	37 707 645,62	41 926 015,81
Retribusi Daerah	13 014 162,92	8 121 255,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 318 642,72	6 788 136,03
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73 557 075,48	104 810 494,84
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>993 329 427,60</b>	<b>1 024 584 932,87</b>
Bagi Hasil Pajak	28 136 399,08	24 245 226,50
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21 064 307,53	9 516 858,37
Dana Alokasi Umum ( DAU )	847 657 151,00	881 977 998,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	96 471 570,00	108 844 850,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>224 663 043,56</b>	<b>361 531 059,61</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	62 406 896,56	65 616 224,61
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	162 256 147,00	295 914 835,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 550 572 554,24</b>	<b>1 673 230 554,39</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>83 131 971,56</b>	<b>84 496 936,51</b>
Pajak Daerah	24 379 040,98	25 086 449,38
Retribusi Daerah	5 618 163,73	4 429 279,81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 947 448,21	2 184 386,13
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51 187 318,64	52 796 821,20
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 156 884 045,51</b>	<b>1 164 854 841,36</b>
Bagi Hasil Pajak	0,00	51 219 716,65
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	150 380 012,51	40 415 411,70
Dana Alokasi Umum ( DAU )	940 041 243,00	974 792 193,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	66 462 790,00	98 427 520,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>310 556 537,17</b>	<b>423 878 776,52</b>
Pendapatan Hibah	0,00	803 070,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	60 035 523,77	63 010 001,52
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	250 521 013,40	360 065 705,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00



**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 789 233 628,03</b>	<b>2 023 624 159,31</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>108 180 987,62</b>	<b>116 343 189,03</b>
Pajak Daerah	40 290 414,76	48 630 649,35
Retribusi Daerah	33 673 876,08	6 351 980,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 427 622,38	6 325 665,77
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27 789 074,40	55 034 893,37
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 329 265 207,22</b>	<b>1 377 672 256,12</b>
Bagi Hasil Pajak	42 669 940,43	38 831 325,50
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25 612 484,78	9 515 051,62
Dana Alokasi Umum ( DAU )	1 177 513 282,00	1 220 616 169,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	83 469 500,00	108 709 710,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>351 787 433,20</b>	<b>529 608 714,16</b>
Pendapatan Hibah	0,00	242 714,75
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	76 736 498,20	529 365 999,41
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275 050 935,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

**Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2014-2015****(000 Rp)**

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 292 431 677,52</b>	<b>1 400 795 158,17</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>80 918 349,92</b>	<b>93 239 503,92</b>
Pajak Daerah	16 190 430,17	16 534 093,37
Retribusi Daerah	4 775 117,04	6 515 253,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 359 031,05	5 959 522,14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54 593 771,66	64 230 634,53
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>973 140 651,23</b>	<b>989 119 165,47</b>
Bagi Hasil Pajak	24 293 307,87	21 056 803,35
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20 870 344,36	10 019 729,12
Dana Alokasi Umum ( DAU )	838 661 589,00	861 223 023,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	89 315 410,00	96 819 610,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>238 372 676,37</b>	<b>318 436 488,78</b>
Pendapatan Hibah	0,00	1 250 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	52 767 170,49	53 688 210,78
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185 605 505,88	263 498 278,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

**Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>871 294 716,36</b>	<b>1 050 154 741,24</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>45 811 422,79</b>	<b>47 882 003,79</b>
Pajak Daerah	13 836 375,47	8 766 126,60
Retribusi Daerah	19 320 790,90	1 067 784,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 454 645,54	2 683 130,48
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10 199 610,88	35 364 961,86
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>701 026 300,81</b>	<b>780 633 656,98</b>
Bagi Hasil Pajak	24 470 755,99	20 825 049,61
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21 170 453,82	9 606 771,37
Dana Alokasi Umum ( DAU )	573 114 161,00	639 549 226,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	82 270 930,00	110 652 610,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>124 456 992,77</b>	<b>221 639 080,47</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	45 650 925,77	45 756 060,67
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78 804 967,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	175 876 349,00
Lainnya	1 100,00	6 670,80

**Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>804 796 952,53</b>	<b>985 919 800,81</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>24 444 892,15</b>	<b>34 088 549,87</b>
Pajak Daerah	13 175 797,96	14 503 936,67
Retribusi Daerah	2 915 095,52	4 967 170,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 520 417,06	3 553 189,11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4 833 581,62	11 064 253,99
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>649 804 534,37</b>	<b>748 924 608,92</b>
Bagi Hasil Pajak	35 082 992,23	28 973 747,30
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21 679 798,14	10 858 516,62
Dana Alokasi Umum ( DAU )	533 313 684,00	548 942 825,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	59 728 060,00	160 149 520,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>130 547 526,00</b>	<b>202 906 642,02</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 921 632,11	46 726 853,85
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	155 923 646,99
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	81 625 893,89	256 141,19

**Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>913 575 380,53</b>	<b>948 857 310,02</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>36 482 436,46</b>	<b>37 060 018,72</b>
Pajak Daerah	8 154 156,96	8 078 693,43
Retribusi Daerah	1 854 086,44	1 744 529,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	245 351,32	247 635,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26 228 841,74	26 989 160,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>739 876 226,10</b>	<b>703 319 355,82</b>
Bagi Hasil Pajak	14 620 113,67	13 183 317,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20 957 158,43	9 713 833,42
Dana Alokasi Umum ( DAU )	625 845 694,00	601 857 515,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	78 453 260,00	78 564 690,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>137 216 717,97</b>	<b>208 477 935,48</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	39 987 237,97	42 622 509,48
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97 229 480,00	165 855 426,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

**Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>881 912 476,11</b>	<b>1 038 513 725,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>63 339 740,42</b>	<b>61 765 136,00</b>
Pajak Daerah	11 279 888,98	12 949 400,00
Retribusi Daerah	2 299 715,26	2 844 536,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450 754,72	616 008,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49 309 381,46	45 355 192,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>632 686 845,28</b>	<b>738 757 807,00</b>
Bagi Hasil Pajak	16 998 922,27	9 716 529,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20 833 427,02	9 851 617,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	547 622 366,00	570 582 781,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	47 232 130,00	148 606 880,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>185 885 890,40</b>	<b>237 990 782,00</b>
Pendapatan Hibah	0,00	199 145 339,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	35 618 895,40	38 845 443,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	150 266 995,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

**Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>564 977 366,62</b>	<b>618 615 828,94</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>20 901 990,43</b>	<b>18 713 301,11</b>
Pajak Daerah	4 321 789,59	4 574 612,50
Retribusi Daerah	3 942 802,18	3 649 788,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	406 884,44	1 232 016,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12 230 514,24	9 256 883,57
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>476 213 538,98</b>	<b>532 040 690,62</b>
Bagi Hasil Pajak	13 986 195,34	14 761 771,70
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22 723 313,64	12 028 753,92
Dana Alokasi Umum ( DAU )	387 694 110,00	402 889 285,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	51 809 920,00	102 360 880,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>67 861 837,21</b>	<b>67 861 837,21</b>
Pendapatan Hibah	2 000 000,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	32 174 793,21	34 361 386,95
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27 006 316,00	26 388 926,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	7 111 524,26

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>624 649 941,27</b>	<b>804 614 488,16</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15 436 104,69</b>	<b>16 452 748,57</b>
Pajak Daerah	6 788 944,97	7 309 449,59
Retribusi Daerah	1 195 256,30	1 535 244,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	406 884,44	971 344,37
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 045 018,99	6 636 709,94
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>509 035 368,24</b>	<b>639 750 823,72</b>
Bagi Hasil Pajak	13 395 650,39	12 666 404,50
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20 805 783,84	9 298 930,22
Dana Alokasi Umum ( DAU )	424 389 404,00	442 703 859,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	50 444 530,00	175 081 630,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>100 178 468,34</b>	<b>148 410 915,87</b>
Pendapatan Hibah	1 500 000,00	9 500 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	33 853 630,05	35 214 229,79
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59 026 620,00	66 621 817,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	5 798 218,29	37 074 869,08



**Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>384 184 717,26</b>	<b>570 272 841,58</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10 373 342,75</b>	<b>11 597 895,33</b>
Pajak Daerah	2 238 704,07	3 622 691,67
Retribusi Daerah	6 063 116,50	965 056,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2 071 522,18	7 010 147,44
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>250 299 171,51</b>	<b>435 162 743,25</b>
Bagi Hasil Pajak	8 655 517,33	10 099 261,80
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 627 027,17	5 033 533,45
Dana Alokasi Umum ( DAU )	227 314 157,00	363 080 538,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	4 702 470,00	56 949 410,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>123 512 203,01</b>	<b>123 512 203,01</b>
Pendapatan Hibah	10 000 000,00	8 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	32 457 255,02	32 645 918,41
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36 537 892,00	43 533 155,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	0,00	39 333 129,60

**Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 839 004 647,11</b>	<b>1 843 540 675,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>394 646 889,45</b>	<b>397 547 326,00</b>
Pajak Daerah	246 167 925,21	258 454 662,00
Retribusi Daerah	45 920 496,94	46 682 837,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 206 503,30	11 249 898,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89 351 963,99	81 159 929,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1 040 433 426,63</b>	<b>1 016 422 749,00</b>
Bagi Hasil Pajak	54 643 065,13	35 311 983,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21 121 790,50	9 665 947,00
Dana Alokasi Umum ( DAU )	921 826 931,00	950 106 009,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	42 841 640,00	21 338 810,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>403 924 331,04</b>	<b>429 570 600,00</b>
Pendapatan Hibah	41 796 053,52	15 147 918,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	85 684 220,52	108 212 183,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	250 170 293,00	283 694 522,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	26 273 764,00	22 515 977,00

**Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>705 744 010,78</b>	<b>741 457 259,14</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>97 307 834,64</b>	<b>127 586 002,96</b>
Pajak Daerah	12 651 879,44	14 309 185,60
Retribusi Daerah	5 417 625,67	4 944 419,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 389 937,35	3 797 944,26
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75 848 392,17	104 534 453,24
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>487 715 129,64</b>	<b>494 176 895,42</b>
Bagi Hasil Pajak	18 206 944,80	14 435 157,10
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20 805 783,84	9 361 248,32
Dana Alokasi Umum ( DAU )	414 624 161,00	422 921 330,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	34 078 240,00	47 459 160,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>120 721 046,50</b>	<b>119 694 360,76</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	36 285 142,85	35 347 822,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	77 989 976,00	84 346 538,18
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	6 445 927,65	0,00

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15 077 794 005,17</b>	<b>17 374 445 306,07</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1 174 862 546,34</b>	<b>1 276 832 335,17</b>
Pajak Daerah	452 080 335,43	481 973 462,93
Retribusi Daerah	151 758 855,68	97 084 253,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50 496 724,63	52 593 094,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	520 526 630,60	645 181 524,51
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>11 243 462 592,67</b>	<b>12 165 893 796,58</b>
Bagi Hasil Pajak	347 031 339,92	339 540 949,63
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	424 763 716,74	169 799 095,95
Dana Alokasi Umum ( DAU )	9 517 884 446,00	10 071 085 851,00
Dana Alokasi Khusus ( DAK )	953 783 090,00	1 585 467 900,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2 659 468 866,17</b>	<b>3 931 719 174,32</b>
Pendapatan Hibah	58 296 053,52	317 278 696,47
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	723 095 777,55	1 213 229 385,58
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 706 734 347,28	1 849 409 774,16
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	175 876 349,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	271 481 168,50	375 924 969,10

**Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>627 029 312,03</b>	<b>893 360 816,78</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>331 242 824,56</b>	<b>391 142 623,42</b>
Belanja Pegawai	293 326 733,59	310 356 460,69
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	13 880 654,00	11 424 910,00
Belanja Bantuan Sosial	2 310 300,00	37 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	486 108,25	671 281,80
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20 903 070,72	68 375 399,93
Belanja Tidak Terduga	335 958,00	277 071,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>295 786 487,47</b>	<b>502 218 193,36</b>
Belanja Pegawai	35 837 267,76	51 914 966,92
Belanja Barang dan Jasa	99 667 447,39	147 697 113,92
Belanja Modal	160 281 772,32	302 606 112,52

**Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>993 881 456,25</b>	<b>1 151 913 068,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>551 837 952,97</b>	<b>667 812 864,31</b>
Belanja Pegawai	502 580 079,72	547 365 571,84
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	250 000,00	0,00
Belanja Hibah	20 275 496,43	23 827 181,70
Belanja Bantuan Sosial	2 249 285,65	2 714 314,30
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	689 384,69
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22 094 134,67	92 848 061,78
Belanja Tidak Terduga	4 388 956,50	368 350,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>442 043 503,28</b>	<b>484 100 203,69</b>
Belanja Pegawai	38 713 368,45	47 585 019,00
Belanja Barang dan Jasa	167 141 470,35	217 203 792,71
Belanja Modal	236 188 664,48	219 311 391,98

**Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 263 321 080,30</b>	<b>1 601 811 281,64</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>747 603 115,38</b>	<b>902 085 804,08</b>
Belanja Pegawai	694 766 263,68	749 696 118,73
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	23 968 879,20	40 445 366,70
Belanja Bantuan Sosial	1 560 500,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	26 324 701,00	111 730 668,66
Belanja Tidak Terduga	982 771,50	213 650,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>515 717 964,92</b>	<b>699 725 477,56</b>
Belanja Pegawai	65 836 782,05	100 991 110,18
Belanja Barang dan Jasa	243 823 952,47	256 293 083,99
Belanja Modal	206 057 230,41	342 441 283,39

**Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 512 492 030,22</b>	<b>1 733 408 499,65</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>938 748 771,23</b>	<b>1 131 455 098,49</b>
Belanja Pegawai	798 684 384,01	869 415 532,13
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	250 000,00	640 000,00
Belanja Hibah	14 151 876,00	60 200 820,48
Belanja Bantuan Sosial	4 202 006,02	100 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	112 689,70	116 510,13
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120 897 646,90	200 713 610,70
Belanja Tidak Terduga	450 168,60	268 625,05
<b>Belanja Langsung</b>	<b>573 743 258,99</b>	<b>601 953 401,17</b>
Belanja Pegawai	58 469 739,06	61 344 684,52
Belanja Barang dan Jasa	301 550 350,54	284 700 760,82
Belanja Modal	213 723 169,39	255 907 955,83



**Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 724 090 117,47</b>	<b>1 776 431 807,26</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 117 485 168,86</b>	<b>1 153 581 205,61</b>
Belanja Pegawai	1 055 867 377,00	1 111 086 935,20
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	17 498 521,00	42 384 825,98
Belanja Bantuan Sosial	2 599 500,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	39 271 080,86	0,00
Belanja Tidak Terduga	2 248 690,00	109 444,43
<b>Belanja Langsung</b>	<b>606 604 948,61</b>	<b>622 850 601,65</b>
Belanja Pegawai	46 780 836,22	49 587 008,21
Belanja Barang dan Jasa	206 335 347,43	263 950 182,67
Belanja Modal	353 488 764,96	309 313 410,78

**Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 163 202 313,49</b>	<b>1 436 536 172,42</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>726 332 701,12</b>	<b>844 025 384,91</b>
Belanja Pegawai	712 508 161,30	754 464 520,37
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	542 000,00	4 056 003,00
Belanja Bantuan Sosial	5 600 500,00	118 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	92 101,82	197 750,79
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6 992 488,00	84 517 925,66
Belanja Tidak Terduga	597 450,00	671 185,09
<b>Belanja Langsung</b>	<b>436 869 612,37</b>	<b>592 510 787,52</b>
Belanja Pegawai	65 414 437,75	76 599 142,87
Belanja Barang dan Jasa	157 367 625,23	226 077 311,02
Belanja Modal	214 087 549,39	289 834 333,62

**Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>845 628 401,73</b>	<b>1 068 870 869,36</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>436 086 120,05</b>	<b>548 666 200,06</b>
Belanja Pegawai	393 417 642,91	427 455 716,82
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	11 977 460,00	30 638 460,45
Belanja Bantuan Sosial	4 919 500,00	3 223 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	25 743 945,14	87 289 892,59
Belanja Tidak Terduga	27 572,00	58 630,20
<b>Belanja Langsung</b>	<b>409 542 281,68</b>	<b>520 204 669,29</b>
Belanja Pegawai	28 528 346,70	26 859 172,50
Belanja Barang dan Jasa	148 746 461,24	204 631 864,60
Belanja Modal	232 267 473,74	288 713 632,19

**Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>776 125 961,71</b>	<b>978 687 514,97</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>359 644 712,19</b>	<b>445 453 144,45</b>
Belanja Pegawai	310 761 239,21	344 001 508,81
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	670 812,22	999 996,60
Belanja Hibah	10 042 500,00	9 768 000,00
Belanja Bantuan Sosial	227 500,00	117 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	37 463 360,77	90 566 639,05
Belanja Tidak Terduga	479 300,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>416 481 249,53</b>	<b>533 234 370,52</b>
Belanja Pegawai	55 977 285,00	44 483 918,99
Belanja Barang dan Jasa	186 645 481,53	217 060 374,40
Belanja Modal	173 858 483,00	271 690 077,13

**Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>930 780 038,47</b>	<b>928 741 216,82</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>454 323 514,26</b>	<b>540 526 755,67</b>
Belanja Pegawai	420 102 540,49	449 173 795,37
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	7 960 456,67	28 231 446,30
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	26 260 517,10	63 121 514,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>476 456 524,21</b>	<b>388 214 461,16</b>
Belanja Pegawai	58 308 291,00	58 276 323,00
Belanja Barang dan Jasa	155 633 706,52	120 616 209,00
Belanja Modal	262 514 526,69	209 321 929,16

**Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>840 212 481,49</b>	<b>1 002 293 230,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>540 779 248,05</b>	<b>564 018 874,00</b>
Belanja Pegawai	504 222 828,10	503 060 953,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	23 060 220,00	10 500 974,00
Belanja Bantuan Sosial	4 901 500,86	1 033 502,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8 569 199,09	49 423 445,00
Belanja Tidak Terduga	25 500,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>299 433 233,44</b>	<b>438 274 356,00</b>
Belanja Pegawai	32 855 073,53	36 908 240,00
Belanja Barang dan Jasa	136 927 718,37	169 015 201,00
Belanja Modal	129 650 441,55	232 350 915,00

**Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>517 734 653,43</b>	<b>636 024 180,65</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>187 863 955,03</b>	<b>258 399 100,74</b>
Belanja Pegawai	148 861 853,85	170 593 010,18
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	5 106 800,00	2 147 557,50
Belanja Bantuan Sosial	14 565 000,00	30 249 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	17 657 088,62	53 184 800,52
Belanja Tidak Terduga	1 673 212,55	2 224 732,54
<b>Belanja Langsung</b>	<b>329 870 698,40</b>	<b>377 625 079,91</b>
Belanja Pegawai	33 464 738,90	39 545 578,49
Belanja Barang dan Jasa	139 016 144,32	179 555 951,26
Belanja Modal	157 389 815,18	158 523 550,17

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>576 692 368,01</b>	<b>761 325 163,62</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>247 863 243,22</b>	<b>272 504 591,96</b>
Belanja Pegawai	227 554 025,18	265 038 401,96
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	4 275 948,25	7 446 190,00
Belanja Bantuan Sosial	433 020,00	20 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	15 600 249,79	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>328 829 124,80</b>	<b>488 820 571,66</b>
Belanja Pegawai	33 714 257,00	35 848 179,10
Belanja Barang dan Jasa	129 562 913,19	162 083 004,42
Belanja Modal	165 551 954,61	290 889 388,14



**Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>276 015 491,78</b>	<b>550 986 272,80</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>153 576 165,02</b>	<b>246 804 655,87</b>
Belanja Pegawai	134 944 538,57	158 604 051,49
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	16 312 225,00
Belanja Bantuan Sosial	2 545 000,00	467 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	220 723,95	405 502,71
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15 852 637,50	71 015 876,67
Belanja Tidak Terduga	13 265,00	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>122 439 326,76</b>	<b>304 181 616,94</b>
Belanja Pegawai	7 244 517,90	16 151 251,90
Belanja Barang dan Jasa	40 208 943,58	66 160 641,31
Belanja Modal	74 985 865,28	221 869 723,73

**Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 799 475 905,42</b>	<b>1 757 419 862,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>944 850 740,18</b>	<b>1 019 290 069,00</b>
Belanja Pegawai	903 931 706,44	937 071 283,00
Belanja Bunga	6 392 664,54	4 971 683,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	23 348 257,50	62 306 707,00
Belanja Bantuan Sosial	9 312 387,71	12 517 800,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	732 724,00	969 094,00
Belanja Tidak Terduga	1 133 000,00	1 453 502,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>854 625 165,23</b>	<b>738 129 793,00</b>
Belanja Pegawai	132 123 226,93	127 438 436,00
Belanja Barang dan Jasa	368 311 410,15	365 520 061,00
Belanja Modal	354 190 528,15	245 171 296,00

**Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>693 309 716,71</b>	<b>757 883 440,37</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>354 808 007,56</b>	<b>349 033 342,43</b>
Belanja Pegawai	335 111 942,15	337 120 337,13
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	18 504 985,72	11 270 136,60
Belanja Bantuan Sosial	5 000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 117 413,32	642 868,70
Belanja Tidak Terduga	68 666,36	0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>338 501 709,15</b>	<b>408 850 097,94</b>
Belanja Pegawai	26 195 306,32	32 780 100,39
Belanja Barang dan Jasa	184 607 655,60	210 632 177,49
Belanja Modal	127 698 747,23	165 437 820,06

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>14 539 991 328,51</b>	<b>17 035 693 396,35</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8 093 046 239,68</b>	<b>9 334 799 715,00</b>
Belanja Pegawai	7 436 641 316,21	7 934 504 196,71
Belanja Bunga	6 392 664,54	4 971 683,00
Belanja Subsidi	1 170 812,22	1 639 996,60
Belanja Hibah	194 594 054,76	360 960 804,71
Belanja Bantuan Sosial	55 431 000,24	50 597 616,30
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	911 623,72	2 080 430,12
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	385 480 257,48	974 399 797,25
Belanja Tidak Terduga	12 424 510,51	5 645 190,31
<b>Belanja Langsung</b>	<b>6 446 945 088,83</b>	<b>7 700 893 681,35</b>
Belanja Pegawai	719 463 474,57	806 313 132,07
Belanja Barang dan Jasa	2 665 546 627,90	3 091 197 729,60
Belanja Modal	3 061 934 986,36	3 803 382 819,68

**Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>66 315 006,00</b>	<b>71 339 069,75</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>66 870 224,00</b>	<b>73 522 798,75</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66 870 224,00	73 522 798,75
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>555 218,00</b>	<b>2 183 729,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2 183 729,00
Pembayaran Pokok Utang	555 218,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>42 447 400,11</b>	<b>73 522 915,58</b>

**Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>( 22 576 537,28)</b>	<b>( 59 879 036,47)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>8 566 626,31</b>	<b>7 467 105,57</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8 566 626,31	7 467 105,57
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>31 143 163,59</b>	<b>67 346 142,04</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	31 143 163,59	66 846 142,04
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>7 467 105,57</b>	<b>19 750 102,98</b>

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>101 959 501,46</b>	<b>193 029 728,49</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>117 141 988,00</b>	<b>206 669 228,39</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117 139 628,00	188 799 187,19
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	17 866 041,20
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2 360,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	4 000,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>15 182 486,54</b>	<b>13 639 499,90</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	15 182 486,54	12 139 499,90
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>187 228 419,07</b>	<b>138 980 341,09</b>

**Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>60 529 369,17</b>	<b>97 425 295,89</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>61 637 579,32</b>	<b>98 436 116,90</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61 637 579,32	98 436 116,90
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 108 210,15</b>	<b>1 010 821,02</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	108 210,15	10 821,02
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>98 609 893,19</b>	<b>37 247 350,63</b>



**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  
2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>76 294 461,61</b>	<b>106 950 277,15</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>99 460 383,95</b>	<b>142 459 272,17</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99 382 583,95	142 437 972,18
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	77 800,00	21 300,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>23 165 922,33</b>	<b>35 508 995,02</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	22 165 922,33	35 508 995,02
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>142 437 972,18</b>	<b>354 142 629,20</b>

**Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>35 994 373,58</b>	<b>149 329 104,87</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>40 249 925,49</b>	<b>165 224 040,24</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41 034 090,14	165 224 040,24
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	(784 164,650)	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>4 255 551,91</b>	<b>15 894 935,37</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 500 000,00	3 300 000,00
Pembayaran Pokok Utang	755 551,91	12 594 935,37
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>165 223 737,61</b>	<b>113 588 090,61</b>

**Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>70 205 662,51</b>	<b>84 198 960,16</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>78 331 022,48</b>	<b>95 871 977,14</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	78 305 192,48	95 871 977,14
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	25 830,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8 125 359,98</b>	<b>11 673 016,97</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 250 000,00	1 450 000,00
Pembayaran Pokok Utang	6 875 359,98	10 223 016,97
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>95 871 977,14</b>	<b>65 482 832,05</b>

**Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>2 925 274,05</b>	<b>7 014 914,80</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>18 787 957,03</b>	<b>31 351 879,89</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	18 787 957,03	31 351 879,89
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>15 862 682,98</b>	<b>24 336 965,09</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	15 862 682,98	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	24 336 965,09
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>806 946 100,61</b>	<b>14 247 200,64</b>

**Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>77 434 500,80</b>	<b>( 14 904 304,65)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>90 243 865,01</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90 243 865,01	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>12 809 364,21</b>	<b>14 904 304,65</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	300 000,00
Pembayaran Pokok Utang	12 809 364,21	14 604 304,65
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>60 229 842,86</b>	<b>5 211 788,55</b>

**Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>( 6 988 550,00)</b>	<b>65 370 871,00</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>6 267 863,00</b>	<b>72 223 653,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38 556 047,26	72 223 653,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>13 256 413,00</b>	<b>6 852 782,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	8 032 388,96	6 852 782,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>72 223 652,92</b>	<b>101 591 366,00</b>

**Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>31 232 722,30</b>	<b>63 190 309,81</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>32 079 630,50</b>	<b>69 858 156,02</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32 079 630,50	69 858 156,02
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>846 908,20</b>	<b>6 667 846,22</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	846 908,20	6 667 846,22
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>71 794 707,50</b>	<b>45 781 958,10</b>

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>7 021 923,78</b>	<b>( 42 669 651,56)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>7 021 923,78</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7 021 923,78	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>42 669 651,56</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	42 669 651,56
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>613 996 758,65</b>	<b>619 672,97</b>



**Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>508 331 544,52</b>	<b>11 435 545,88</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>508 331 544,52</b>	<b>59 778 533,24</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	508 331 544,52	59 778 533,24
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>48 342 987,36</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	48 342 987,36
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>339 899 977,32</b>	<b>265 063 761,24</b>

**Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>51 459 709 536,57</b>	<b>( 61 557 125,00)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>51 511 184 766,77</b>	<b>21 008 078,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35 954 566,77	21 008 078,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	51 475 230 200,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>51 475 230,20</b>	<b>82 565 203,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	17 992 740,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33 482 490,20	12 529 586,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	70 035 617,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>1 821 684 507,78</b>	<b>24 563 688,00</b>

**Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2014-2015**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>36 104 037,45</b>	<b>77 394 935,95</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>39 197 414,36</b>	<b>82 234 697,52</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71 532 816,86	82 215 947,75
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	14 174,33	18 749,77
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>3 093 376,91</b>	<b>4 839 761,57</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	100 000,00	3 339 761,57
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>82 881 285,26</b>	<b>60 968 754,72</b>

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  
2014-2015**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<b>Pembiayaan</b>	<b>1 094 684 552,27</b>	<b>747 668 896,08</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>1 275 564 440,27</b>	<b>1 126 105 536,83</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1 275 444 275,93	1 108 195 445,87
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	17 866 041,20
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	120 164,33	40 049,77
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	4 000,00
Lainnya	51 476 014 364,65	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>180 879 888,00</b>	<b>378 436 640,76</b>
Pembentukan Dana Cadangan	17 992 740,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	41 232 490,20	24 263 315,00
Pembayaran Pokok Utang	114 437 256,85	287 166 709,10
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	42 669 651,56
Lainnya	0,00	24 336 965,09
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>4 608 943 337,76</b>	<b>1 320 762 452,37</b>

## DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(1).

BPS Provinsi Lampung. 2016. Statistik Daerah Provinsi Lampung 2016.

BPS Provinsi Lampung. 2016. PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2011-2015.

Pemerintah Provinsi Lampung. 2015. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 (*Audited*).

<http://lampung.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: [bps1800@bps.go.id](mailto:bps1800@bps.go.id), Website: <http://lampung.bps.go.id>

